

ASEAN COMMUNITY 2015 DAN TANTANGANNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

M. Fathoni Hakim

UIN Sunan Ampel Surabaya
mfathonihakim@gmail.com

Abstract

This paper focuses on the challenges and strategies of Islamic education in Indonesia facing ASEAN Community in 2015. Using qualitative approach the writer finds that Islamic education in Indonesia has encountered a serious number of problems. The majority of Islamic boarding schools (*pesantren*) are still run in traditional ways (*salafi*). In addition, the majority of the school leaders do not possess higher education background. Similarly, higher education level has also dealt with another problematic matter in which under graduate students are dominant with 93% compare to graduate students with only 7%. These phenomena would be serious problem for Islamic education in Indonesia facing 2015 ASEAN Community. The question is whether Indonesian Muslims are able to compete with other ASEAN member countries, such as Singapore, Malaysia, and Thailand. Another challenge is that the shifting paradigm from the traditional society to the secular-materialistic one. In this context, therefore, the Islamic education in Indonesia is urged to play its pivotal role

Keywords: ASEAN Community, challenges, Islamic education

Abstrak

Tulisan ini memfokuskan pada tantangan dan strategi pendidikan Islam di Indonesia menghadapi *ASEAN Community* 2015. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, penulis menemukan realitas pendidikan Islam di Indonesia masih memiliki banyak masalah. Di antaranya adalah mayoritas lembaga pendidikan pesantren masih tradisional (*salafi*). Selain itu, mayoritas pimpinan sekolah bukan berlatar belakang perguruan tinggi. Kondisi ini tidak berbeda dengan perguruan yang didominasi mahasiswa strata 1 (93%), hanya 7% pascasarjana. Hal ini akan menjadi masalah serius menghadapi *ASEAN Community* 2015. Tantangan yang muncul adalah kemampuan umat Islam Indonesia dalam bersaing dengan negara-negara anggota *ASEAN* lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Tantangan berikutnya adalah pergeseran paradigma dari masyarakat tradisional ke sekuler-materialistik. Di sinilah peran pendidikan Islam diperlukan.

Kata Kunci: Komunitas *ASEAN*, tantangan, pendidikan Islam

Pendahuluan

Kawasan Asia Tenggara memiliki organisasi regional yang bernama ASEAN. Institusi regional ini didirikan pada tahun 1967 dengan fokus pada isu keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara (*ASEAN Declaration*). Dimulai dari lima negara pendiri, yakni Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand, kini ASEAN terdiri dari sepuluh Negara yang bergabung kemudian, yakni Brunai Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997), serta Kamboja (1999).

Namun, seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan lingkungan strategis regional yang berkembang, ASEAN mulai fokus pada isu ekonomi, yang mengusung semangat stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara melalui percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya dengan tetap mengedepankan kesetaraan dan kemitraan. Pergeseran isu ini semakin nampak ketika pada tahun 1997, di Thailand terjadi krisis ekonomi, sebagai dampak dari globalisasi dan integrasi keuangan dunia. Krisis ekonomi ini kemudian merembet ke negara-negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura. Untuk itu, ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan, juga aktif meresponnya dengan semangat kerjasama yang dikenal dengan istilah *regional self-help*.

Langkah ASEAN diatas, sejalan dengan tuntutan global yang ditandai dengan semakin menjamurnya bentuk integrasi keuangan dan ekonomi di berbagai kawasan. Sebut misalnya Eropa, integrasi regionalnya diawali dengan integrasi ekonomi (sektor riil) yang kemudian diikuti dengan integrasi moneter dan diakhiri dengan pembentukan mata uang Euro (Arifin, 2007:1). Di kawasan Afrika juga memiliki institusi regional (*CFA Franc Zonedan Gulf Area*) yang bertugas mengintegrasikan ekonomi di kawasan tersebut dengan membentuk dan menggunakan mata uang bersama. Artinya, meskipun di kawasan Asia Tenggara belum dimunculkan mata uang ber-

sama, namun ASEAN sebagai *leading sector* bentuk integrasi di kawasan, melakukan upaya kesepakatan-kesepakatan, diantaranya Komunitas ASEAN 2015 (*ASEAN Community 2015*)

Komunitas ASEAN 2015 (*ASEAN Community 2015*) adalah suatu kesepakatan tentang pembentukan komunitas yang terdiri dari tiga pilar, yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), Masyarakat Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*) dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-cultural Community*). Ketiga pilar ini saling berkaitan satu sama lain dan saling memperkuat tujuan pencapaian perdamaian yang berkelanjutan, stabilitas serta pemerataan kesejahteraan di kawasan (12th ASEAN Summit, 2007).

Dalam mewujudkan “mimpi” tersebut, pelaksanaan pilar *pertama* ASEAN Community 2015 (yakni dimensi ekonomi) adalah semakin bebas dan terbukanya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal pada tahun 2015 kedepan. Hal ini sesuai dengan tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020. “... to create a stable, prosperous, and highly competitive ASEAN Economic region in which there is a free flow of goods, service, investment, skilled labour, and free flow of capital, equitable economic, development and reduced poverty and socio economic disparities in year 2020.”

Visi ASEAN di atas, yang awalnya akan dicanangkan pada tahun 2020, dipercepat lima tahun menjadi tahun 2015, sehingga muncul kesepakatan pembentukan Komunitas ASEAN 2015 (*ASEAN Community 2015*). Percepatan visi ini bukan tanpa alasan. Argumentasi utamanya adalah kebangkitan China dan India (*The Rising of Chindia*) yang bisa menyaingi kekuatan AS, khususnya di bidang ekonomi. Harapannya, untuk memperkuat daya saing negara-negara anggota ASEAN, mengingat kedekatan geografis (China dan India terikat satu benua dengan ASEAN; yakni Asia Pasifik), sehingga bisa merespon dan mendapatkan nilai positif dari kebangkitan

China dan India dengan mempercepat “mimpi” ASEAN di tahun 2015.

Pilar *kedua* pada Komunitas ASEAN 2015 (*ASEAN Community 2015*) adalah bidang keamanan (*ASEAN Security Community*). Di bidang keamanan, lingkungan strategis yang berkembang (baik global, regional maupun nasional) adalah proliferasi gerakan teroris. Di era globalisasi ini, gerakan terorisme sering melibatkan beberapa negara dan tidak memandang garis perbatasan internasional(transnasional). Nassar menambahkan bahwa globalisasi meningkatkan aktivitas kekerasan yang diwujudkan dalam bentuk teror. Perubahan pesat yang dibawa proses globalisasi menyebabkan masyarakat terpolarisasi (Nassar, 2010:14). Singkat kata, globalisasi memproduksi marjinalisasi dan kemiskinan, sedangkan marjinalisasi dan kemiskinan merangsang orang untuk melakukan aksi teror. Belum lagi ancaman keamanan di kawasan terkait dengan perdagangan obat terlarang, perdagangan manusia (*trafficking*), perdagangan senjata, pencurian ikan (*illegal fishing*), yang kesemuanya itu membutuhkan kerjasama keamanan intra ASEAN dalam kerangka *ASEAN Security Community*.

Pilar *ketiga* dalam Komunitas ASEAN 2015 (*ASEAN Community 2015*) adalah Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-cultural Community*). Roadmap *ASEAN Socio-cultural Community* terkandung enam program kerja yang harus diwujudkan oleh semua Negara ASEAN, yakni; *human development, social welfare and protection, social justice and rights, ensuring environmental sustainability, narrowing the development GAP and building the ASEAN identity (A Roadmap for an ASEAN Community, 2009:68)*.

Dalam kerangka sosial-budaya, terdapat aspek pendidikan yang diharapkan mampu menopang *ASEAN Community 2015*. Sebelumnya, pada tahun 1995, ASEAN memiliki jaringan pendidikan tinggi, yakni *ASEAN University Network* (AUN). AUN sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi ke-4 ASEAN

pada tahun 1992 silam. Latar belakang pendirian AUN ini tidak lain adalah untuk mempercepat solidaritas dan pengembangan identitas regional melalui promosi pengembangan sumber daya manusia dengan jalan penguatan jaringan yang sudah ada di tingkat universitas dan institusi pendidikan unggulan di kawasan.

Dari paparan diatas, kita bisa melihat bahwasannya tiga pilar yang disepakati negara anggota ASEAN dalam kerangka *ASEAN Community*, yakni pilar ekonomi, keamanan dan sosial budaya, ketiga-tiganya saling melengkapi satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi, pergerakan barang dan jasa serta investasi tidak akan bisa terwujud tanpa adanya dimensi keamanan yang menjamin kelancaran kegiatan ekonomi tersebut. Begitu juga dengan aspek sosial-budaya, yang diperlukan untuk pengembangan rasa kebersamaan dan solidaritas, termasuk didalamnya pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Harapannya, ketika tingkat SDM masyarakat ASEAN sudah setara (*equal*), akan semakin mempercepat integrasi ekonomi sebagai pilar utama *ASEAN Community*. Hal ini sesuai dengan pemikiran Menko Kesra, Agung Laksono yang mengusulkan tentang peningkatan kerjasama Negara ASEAN di bidang pendidikan. Kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama siswa dan mahasiswa di kawasan ASEAN.¹

Sebagai Negara anggota terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki peran yang strategis sebagai pelaku (subjek) dalam kesepakatan *ASEAN Community 2015*. Oleh karenanya, menjadi penting bagi kita untuk mengetahui persiapan Indonesia dalam komunitas bersama tersebut. Apa saja peluang dan tantangan yang muncul, serta *benefit* apa yang di dapat Indonesia dan negara-negara anggota lainnya di kawasan. Jangan sampai Indonesia menjadi objek dalam kebijakan ini, yang justru akan sangat merugikan kita.

¹ Pidato HR. Agung Laksono pada Sidang ASEAN Sosio Culture Community (ASCC) ke-9

Lalu, bagaimana dengan dinamika pendidikan Islam di kawasan Asia Tenggara. Ini perlu dipikirkan bersama mengingat populasi masyarakat muslim di Asia Tenggara mencapai 41%). Berikut akan ditampilkan jumlah penduduk dan penduduk muslim dari negara-negara anggota ASEAN

Tabel 1
Jumlah Penduduk dan Penduduk Muslim Asia Tenggara Tahun 2010

No	Negara	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Muslim
1.	Indonesia	237.556.363	210.049.599
2.	Malaysia	27.565.821	16.815.150
3.	Singapura	5.076.700	761.505
4.	Brunei	401.890	269.266
5.	Thailand	66.720.153	3.069.127
6.	Filipina	101.833.938	6.091.697
7.	Myanmar	58.840.000	2.353.600
8.	Vietnam	85.846.997	85.845
9.	Laos	6.477.211	2.306
10.	Kamboja	13.388.910	669.645
Total		603.707.983	240.167.740

Sumber: *diolah dari pelbagai sumber*

Karenanya, menjadi penting kiranya memotret dinamika pendidikan Islam di ASEAN secara umum, dan Indonesia pada khususnya. Mengapa Indonesia, karena selain Indonesia merupakan Negara terbesar di komunitas ASEAN, Indonesia juga memiliki penduduk yang mayoritas muslim.

Regionalisme, Komunitas dan Integrasi Ekonomi; Telaah Konsepsional

Di dalam studi hubungan internasional, regionalisme sangat erat hubungannya dengan studi kawasan (*area studies*). Menurut Mansbaach, dalam Suparman (2010), region atau kawasan adalah pengelompokan regional yang diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan interdependensi dalam bidang ekonomi yang saling mengun-

tungkan, komunikasi, serta keikutsertaan dalam organisasi internasional. Lebih lanjut, Rudy menambahkan bahwa hal terpenting dari kajian regionalisme adalah meninjau derajat keeratan (*level of cohesion*), struktur dalam pelaksanaan peran atau percaturan politik (*structure of relations*) dalam suatu kawasan, serta rasa kebersamaan yang mewarnai tumbuhnya kerjasama regional tersebut (Rudy, 1997: 22).

Hurrel lebih dalam menambahkan bahwa proses menuju regionalisme memiliki beberapa tahapan, yakni; *pertama*, regionalisasi, yakni merujuk pada proses pertumbuhan integrasi kemasyarakatan dalam suatu wilayah, yang proses interaksi sosial dan ekonominya cenderung tidak terarah. Proses ini bersifat alami dimana dengan sendirinya negara-negara yang saling bertetangga dan secara geografis berdekatan, melakukan serangkaian kerjasama guna memenuhi berbagai kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri.

Proses *kedua* adalah proses kesadaran dan identitas regional. Pada tataran ini, kesadaran regional merupakan persepsi bersama tentang rasa memiliki pada suatu komunitas tertentu dengan faktor internal sebagai pengikat, misalnya sering didefinisikan dalam kerangka kesamaan budaya, sejarah atau agama. Adakalanya kesadaran regional ini juga bersifat eksternal, terutama misalnya menyangkut masalah ancaman keamanan.

Ketiga, proses regionalisme lebih dalam terikat lagi ke dalam bentuk kerjasama regional antar negara. Kerjasama disini bisa memiliki tujuan yang sangat luas. Di satu sisi, kerjasama bisa menjadi sarana dalam merespon berbagai tantangan eksternal, disisi lain kerjasama bisa dikembangkan guna menjamin tercapainya berbagai tujuan, nilai bersama atau sekedar untuk memecahkan masalah bersama.

Keempat, integrasi regional yang didukung oleh negara. Salah satu sub kategori penting dalam kerjasama regional adalah integrasi ekonomi regional. Integrasi regional melibatkan pembuatan kebijakan khusus oleh pemerintah yang di-

susun untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan dalam pertukaran barang, jasa, dan manusia. Lebih lanjut, hal ini bisa berupa perluasan penghapusan hambatan non-tarif, regulasi pasar dan pengembangan kebijakan bersama.

Kelima, tahap kohesi regional. Pada level ini akan terbentuk ‘tujuan akhir tertentu’, yakni terbentuknya suatu komunitas politik yang baru. Fokusnya adalah penyatuan kedaulatan yang mengarah pada munculnya bentuk komunitas politik baru. Dalam konteks ini, Komunitas ASEAN 2015 (*ASEAN Community 2015*), bisa dijadikan contoh tahapan kohesi regional di kawasan Asia Tenggara (Hurrell, 1995: 39-45).

Senada dengan konsep regionalisme, penulis juga berkenan untuk memberikan sedikit rujukan tentang makna komunitas, sebagai konsep turunan dari regionalisme. Menurut Emmanuel Adler dan Michael Barnett, komunitas memiliki tiga karakteristik, yakni; (1) para anggota komunitas berbagi identitas-identitas, nilai-nilai dan pengertian-pengertian. (2) mereka yang berada dalam komunitas memiliki hubungan langsung, interaksi yang terjadi bukan secara tidak langsung dan pada domain-domain khusus yang terisolasi, melainkan hubungan-hubungan tatap muka dan dalam berbagai keadaan atau tatacara. (3) komunitas menunjukkan resiprotas yang mengekspresikan derajat tertentu kepentingan jangka panjang dan mungkin bahkan bersifat mementingkan orang lain (*altruism*); kepentingan jangka panjang didorong oleh pengetahuan dengan siapa seseorang berinteraksi, dan *altruism* dapat dipahami sebagai suatu rasa kewajiban serta tanggung jawab (Luhulima, 2008: 14-15).

Konsep berikutnya adalah integrasi ekonomi. Ernst B. Haas mengartikan konsep integrasi sebagai *“a process for the creation of political communities defined institutional or attitudinal terms”*. Penstudi lain mengatakan bahwa integrasi berkaitan dengan kajian bagaimana dan mengapa negara-negara me-

nyerahkan kedaulatannya kepada para tetangganya, sehingga seakan-akan ia kehilangan sebagian kedaulatannya menyatu kedalam suatu bentuk kerjasama (organisasi). Balassa dalam hal ini menambahkan, bahwa integrasi ekonomi merupakan konsep dinamis melalui penghapusan diskriminasi diantara negara yang berbeda maupun dalam konsep statis dengan melihat ada tidaknya perbedaan dalam diskriminasi. Integrasi ekonomi ini, menurut Balassa memiliki 6 tahapan. Untuk memudahkan, penjelasannya akan di rangkum dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 2
Tahapan Integrasi Bela Balassa

Tahapan	Keterangan
<i>Preferential Trading Area (PTA)</i>	Blok perdagangan yang memberikan keistimewaan untuk produk-produk tertentu dengan melakukan pengurangan tarif namun tidak menghilangkannya sama sekali.
<i>Free Trade Area (FTA)</i>	Suatu kawasan dimana tarif dan kuota antara negara anggota dihapuskan, namun masing-masing negara tetap menerapkan tariff mereka masing-masing terhadap negara bukan anggota
<i>Customs Union (CU)</i>	Merupakan <i>free trade area</i> (FTA) yang meniadakan hambatan pergerakan komoditi antar negara anggota dan menerapkan tariff yang sama terhadap negara bukan anggota
<i>Common Market (CM)</i>	Merupakan <i>customs union</i> (CU) yang juga meniadakan hambatan-hambatan pada pergerakan faktor-faktor produksi (barang, jasa, aliran modal). Kesamaan harga dari faktor-faktor produksi diharapkan dapat menghasilkan alokasi sumber yang efisien.
<i>Economic Union (EU)</i>	Merupakan suatu <i>common market</i> (CM) dengan tingkat harmonisasi kebijakan ekonomi nasional yang signifikan (termasuk kebijakan structural).
<i>Total Economic Integration</i>	Penyatuan moneter, fiskal dan kebijakan sosial yang diikuti dengan pembentukan lembaga supranasional dengan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh negara anggota.

Sumber: *diolah dari pelbagai sumber*

Integrasi Ekonomi vis a vis Integrasi Pendidikan

Pendidikan merupakan proses pemanusiaan manusia seutuhnya yang telah melembaga dalam konteks budaya. Pada tataran ini, pendidikan berfungsi sebagai pemberi warna yang melahirkan subjek sosial yang memiliki mandat memimpin dan mengelola sumber daya alam semesta menjadi bermanfaat bagi kemanusiaan. Untuk itu, manusia sudah semestinya melakukan integrasi dengan lingkungan dimana dia berada.

Manusia sempurna adalah manusia yang berposisi sebagai subjek. Sebaliknya, manusia yang hanya beradaptasi adalah manusia yang hanya berposisi sebagai objek. Sedangkan adaptasi tidak lebih dari bentuk pertahanan diri yang paling rapuh. Seseorang akan melakukan tindakan penyesuaian diri (adaptasi), karena dia tidak mampu mengubah realitas.

Pada konteks ini sudah semestinya pendidikan harus diarahkan pada praktik yang mencerdaskan, mencerahkan dan membebaskan. Cerdas, cerah dan bebas dari ketidakadilan, penindasan, pembodohan, dan pemiskinan. Islam juga mengajarkan tentang kebebasan dalam memilih, menyatakan pendapat dan melakukan sesuatu berdasarkan pilihan dan pendapatnya itu, karena Allah SWT menciptakan manusia dengan suatu fitrah (*nature*). Atau secara sederhananya bisa ditafsirkan bahwa kebebasan merupakan sesuatu yang *given by God*. Bebas dari ketertindasan, kebodohan dan kemiskinan adalah hak asasi setiap manusia, yang manusia lainnya tidak bisa merampasnya. Hal ini sama artinya dengan pemerataan kecerdasan (*smart equality*), pemerataan kesejahteraan hidup (*welfare equality*) dan pengakuan eksistensi diri adalah mutlak milik setiap orang dan setiap warga negara. Untuk itu, agar memiliki kecerdasan yang berefek pada peningkatan kesejahteraan hidup dan eksistensi diri, maka peran pendidikan sangat dibutuhkan. Pendidikan sangat berkontribusi terhadap pembentukan subjek sosial yang memiliki mandat memimpin dan mengelola sumber daya alam semesta menjadi bermanfaat bagi kemanusiaan. Melalui pendekatan ini, peran pendidikan

Islam diarahkan dan dibentuk dalam merespon lingkungan yang berkembang, khususnya dalam menghadapi *ASEAN Community 2015*.

Pendidikan Islam dan Lingkungan Strategis

Al-Syaibany (1979) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses pengembangan tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya. Mariamba (1989) menambahkan, pendidikan Islam merupakan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap pengembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama (*kamil*).

Dari dua pemikiran diatas, bisa disimpulkan bahwasannya pendidikan Islam posisinya satu langkah lebih maju, karena selain menata dan mengembangkan pribadi secara lahiriah, pendidikan Islam juga sekaligus mengembangkan fitrah peserta didik, baik ruh dan akal nya secara dinamis, sehingga akan terbentuk pribadi yang utuh dan mendukung bagi pelaksanaan fungsi manusia sebagai *khalifah fi al-ardh*.

Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia (peserta didik) secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran (intelektual), perasaan dan indera. Karenanya, pendidikan Islam hendaknya mencakup pengembangan seluruh aspek fitrah peserta didik, aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, dan bahasa (baik secara individu maupun kolektif). Tujuan akhir pendidikan Islam ini tidak lain adalah perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia.

Namun perlu dicatat, meskipun pendidikan Islam muaranya adalah ketaatan makhluk atas Khaliq, bukan berarti pendidikan Islam lebih menitikberatkan pada aspek rohani saja. Pendidikan Islam sangat memperhatikan perkembangan zaman. Banyak sekali institusi pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu sosial, kedokteran, arsitektur, disamping pe-

ngajaran pendidikan agama. Kontekstualisasi pendidikan Islam ini semangatnya dibangun untuk “ketaatan” kepada Allah Swt dalam bentuk lain, karena diharapkan kaum muslim bisa bersaing dengan kaum yang lain dan diharapkan memiliki kualitas SDM yang memadai, memiliki keahlian dan bisa bermanfaat yang lebih luas kepada umat.

Kontekstualisasi pendidikan Islam wajib dilakukan, mengingat perkembangan dunia yang sangat cepat dan dinamis. Globalisasi misalnya, telah berdampak terhadap semua aspek kehidupan, tidak terkecuali bidang pendidikan. Globalisasi memaksa Indonesia, khususnya pendidikan Islam untuk merubah orientasi pendidikannya menuju pendidikan yang tidak hanya berorientasi kuantitas, tetapi yang lebih utama berorientasi kualitas, kompetensi dan keahlian. Kaum muslim harus melakukan peningkatan kualitas SDM-nya untuk bisa bersaing secara nasional, regional, maupun global. Han bagi kita untuk mampu merespon dinamika social yang berubah, termasuk keberadaan *ASEAN Community 2015*. Dalam konteks kesepakatan komunitas ASEAN, pendidikan Islam wajib merespon perubahan lingkungan strategis di tingkat regional, dengan harapan kaum muslim di Indonesia khususnya dan muslim Asia Tenggara secara umum, bisa mengambil manfaat dan energi positif perubahan lingkungan strategis tersebut.

Oleh karenanya, dalam merumuskan pengembangan pendidikan Islam, maka diperlukan sebuah strategi yang kontekstual yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Konsep lingkungan strategis menjadi pilihan bersama dalam memetakan perkembangan apa saja yang ada dalam level nasional, regional kawasan, maupun level global.

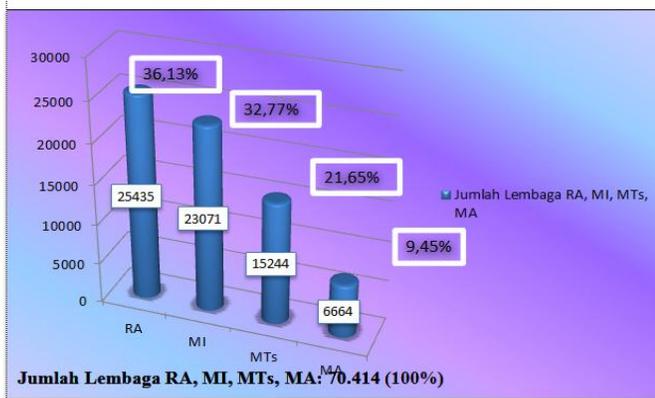
Tinjauan Empirik Pendidikan Islam di Indonesia

1. Lembaga Pendidikan Islam Tingkat Dasar dan Menengah

Indonesia sampai dengan tahun 2012 memiliki sebanyak 70.414 lembaga pendidikan Islam, mulai tingkat dasar sampai dengan menengah dan tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari Raudhotul Atfal (RA)

sebanyak 25.435, Madrasah Ibtida'iyah (MI) sebanyak 23.071, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 15.244 dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 6.664.

Grafik 1
Jumlah Lembaga RA, MI, MTs dan MA
Di Indonesia



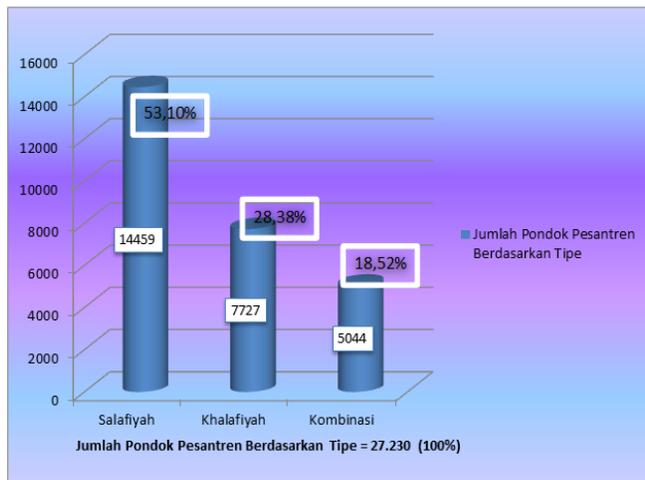
Sumber : Kemenag 2013

Melihat kuantitas data diatas, pendidikan Islam di Indonesia memiliki tempat dan ruang tersendiri dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Indonesia di bidang pendidikan.

2. Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren

Indonesia memiliki lembaga pendidikan pondok pesantren sebanyak 27.230 pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pondok pesantren salafi sebanyak 14.459 pesantren, pondok pesantren modern sebanyak 7.727 pesantren dan pondok pesantren kombinasi antara salafi dan modern sebanyak 5.044 pesantren. Berikut akan ditampilkan kuantitas pondok pesantren dalam grafik.

Grafik 2
Jumlah Pondok Pesantren di Indonesia
Berdasarkan Tipe



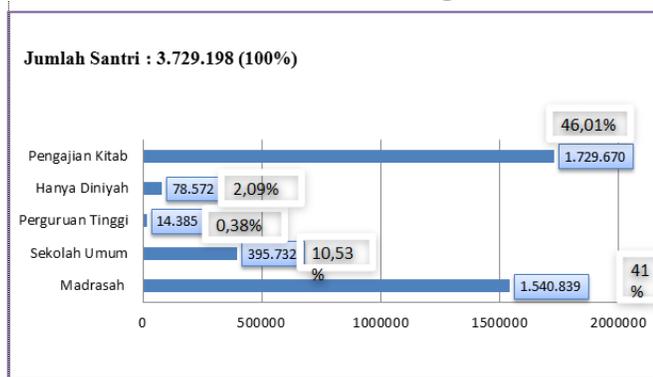
Sumber : Kemenag 2013

Pondok pesantren salafi disini adalah pondok pesantren yang murni hanya mendalami ilmu agama Islam. Pola tradisional yang diterapkan pada pesantren jenis ini adalah para santri bekerja untuk kyai mereka dengan cara mengurus sawah, kolam ikan, dan sebaliknya, para santri diajari ilmu agama oleh kyai mereka. Sebagian besar pesantren salafi menyediakan asrama bagi para santrinya dengan biaya murah, atau bahkan tanpa biaya sama sekali. Di Indonesia jumlah pondok pesantren jenis ini sangat mendominasi, yakni lebih dari separuh jumlah keseluruhan pondok pesantren di Indonesia, yakni mencapai 53%. Sedangkan pondok pesantren yang bertipe modern, selain belajar ilmu agama, tapi juga terdapat kurikulum pendidikan formal yang mempelajari ilmu-ilmu umum non-agama. Banyak juga yang membuat kurikulum sendiri dan mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai pondok pesantren modern, misalnya pondok pesantren modern Darussalam, Gontor, yang memiliki cabang di berbagai penjuru tanah air. Jumlah pesantren modern di Indonesia hingga saat ini mencapai 28%. Sedangkan tipologi yang terakhir adalah pondok pesantren jenis kombinasi, yakni akulturasi kurikulum antara kurikulum agama dan kurikulum modern, namun

dengan tetap menjaga tradisi kesalafannya. Jumlah pondok pesantren kombinasi kurang lebih mencapai 18% di Indonesia.

Senada dengan kuantitas pondok pesantren salafi di atas, jumlah santri yang hanya mempelajari Kitab Kuning sangat mendominasi di Indonesia, yakni mencapai 1.729.670 santri. Disusul dengan santri yang belajar pada madrasah dengan jumlah 1.540.831 santri, sedangkan santri yang juga mempelajari ilmu agama, tetapi juga mengikuti pendidikan formal berjumlah 395.732 santri. Santri yang hanya mempelajari kurikulum diniyah berjumlah 78.532 santri, dan santri yang belajar di perguruan tinggi sebanyak 14.385 santri. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan grafik jumlah dan kategori santri di Indonesia

Grafik 3
Jumlah Santri di Indonesia
Berdasarkan Kategori



Sumber : Kemenag 2013

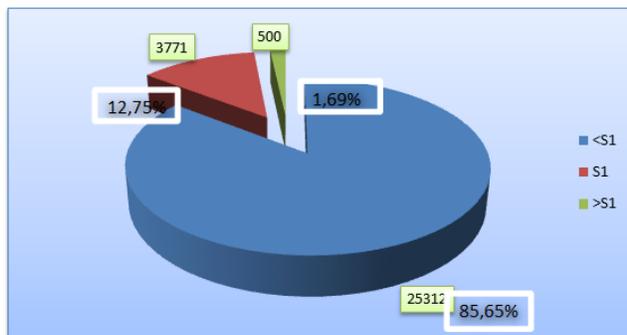
Grafik di atas menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di lingkungan pondok pesantren banyak didominasi oleh para santri yang hanya belajar kitab kuning (jumlahnya mencapai 46%). Sebaliknya, para santri yang melanjutkan ke perguruan tinggi jumlahnya kurang dari 1% (hanya 0,38%). Ini menandakan bahwa lembaga pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren di Indonesia, sebagian besar hanya fokus kepada muatan dan aspek keagamaan saja,

tanpa mempertimbangkan peningkatan skill individu para santri dan absennya berbagai respon lingkungan strategis tingkat regional kawasan.

Data selanjutnya adalah tentang *background* pendidikan kyai, sebagai pimpinan lembaga pendidikan Islam di pondok pesantren. Berdasarkan data yang masuk, jumlah kyai yang tidak mengenyam pendidikan perguruan tinggi sebanyak 25.312 kyai. Sedangkan kyai yang mengenyam pendidikan S1 berjumlah 3.771 kyai, dan kyai yang berpendidikan S2 sebanyak 500 kyai.

Grafik 4

Jumlah Kyai di Indonesia Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Sumber : Kemenag 2013

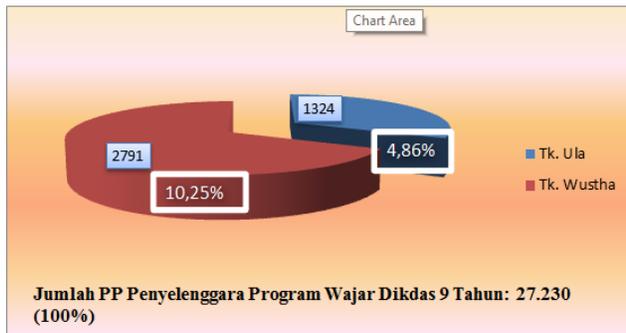
Dari paparan data diatas, bisa dilihat bahwasannya mayoritas kyai dan pimpinan pondok pesantren di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan perguruan tinggi, jumlahnya cukup fantastis, yakni mencapai 85%. Sedangkan kyai yang berpendidikan S1 dan S2 jumlahnya kalau ditotal hanya sekitar 15%. Realitas empirik ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di lingkungan pondok pesantren, mengutamakan pendidikan agama Islam murni, para kyai dan pimpinan pondok pesantrennya bahkan mayoritasnya belum pernah mengenyam pendidikan tinggi, sehingga mayoritas para kyai di Indo-

nesia masih berpikir konvensional dalam merespon perkembangan, baik itu tingkat nasional, regional kawasan, maupun global.

Data diatas akan dikuatkan dengan data pondok pesantren yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. Dari jumlah pondok pesantren di seluruh Indonesia yang mencapai 27.230 pondok pesantren, 85% diantaranya tidak menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. Berikut akan dipaparkan datanya,

Grafik 5

Jumlah Pondok Pesantren di Indonesia yang Menyelenggarakan Program Wajar Dikdas 9 Tahun



Sumber : Kemenag 2013

Data diatas menunjukkan bahwa pondok pesantren di Indonesia yang menyelenggarakan program wajar dikdas 9 tahun hanya berjumlah 4.115 pondok pesantren, atau sekitar 15% dari jumlah total 27.230 pondok pesantren di Indonesia. Dari kuantitas 15% tersebut, 1.324 pondok pesantren menyelenggarakan pendidikan dasar Tingkat Ula, sedangkan yang menyelenggarakan pendidikan dasar Tingkat Wustha hanya 2.791 pondok pesantren. Ini artinya, sekitar 85% pondok pesantren di Indonesia belum menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, seperti apa yang

dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Kalau melihat fakta tersebut, kita tentu bisa membayangkan bagaimana kondisi pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Pertanyaan yang kemudian muncul dari realitas empirik diatas adalah apakah pendidikan Islam di Indonesia tidak mengikuti kontekstualisasi perkembangan yang ada seperti sekarang ini, bagaimana strategi pendidikan Islam, khususnya di lingkungan pesantren dalam menghadapi pasar bebas, khususnya di tingkat regional kawasan, seperti yang sudah disepakati bersama antar Komunitas ASEAN.

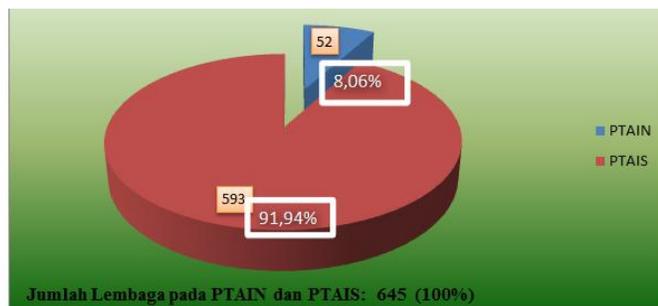
3. Lembaga Pendidikan Islam Tingkat Tinggi (PTAI)

Penulis merasa perlu juga untuk menampilkan data tentang Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Indonesia, sebagai salah satu bagian dari pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Data diawali dengan kuantitas Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) yang terdapat di Indonesia, beserta jumlah mahasiswanya dan peningkatan mahasiswa PTAI di Indonesia.

Jumlah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) adalah sebanyak 52 perguruan tinggi, sedangkan jumlah Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) mencapai 593 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Berikut akan dipaparkan grafiknya:

Grafik 6

Jumlah Lembaga pada PTAIN dan PTAIS di Indonesia Tahun 2012



Sumber : Kemnag 2013

Dari grafik di atas, bisa dilihat bahwasannya dari jumlah 645 perguruan tinggi se-Indonesia, 92% diantaranya adalah dikelola oleh aktor non-negara (swasta), sedangkan hanya sekitar 8%nya dikelola oleh pemerintah (negeri). Ini menunjukkan bahwasannya peran aktor non-negara (swasta) begitu besar dalam memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Dari jumlah 593 perguruan tinggi Islam swasta tersebut, mayoritas memiliki asrama seperti pondok pesantren pada umumnya. Biasanya, perguruan tinggi Islam swasta tersebut satu atap dengan yayasan pondok pesantren, sehingga penyelenggara pendidikan (swasta) tersebut menyediakan pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan tinggi dengan satu atap yayasan.

Berdasar atas jumlah, peran swasta dalam membantu pemerintah di bidang pendidikan Islam di Indonesia tidak boleh dikesampingkan. Namun, siapapun penyelenggara pendidikan Islam (baik pemerintah maupun swasta) idealnya harus mengikuti perkembangan yang ada (kontekstual), mengingat pendidikan yang dikelola adalah pendidikan tingkat tinggi.

Paparan selanjutnya adalah data tentang jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Indonesia. Ini sangat penting untuk dipaparkan, untuk mengetahui seberapa banyak mahasiswa yang belajar pada PTAIN di tingkat Diploma, S1, S2 maupun S3. Jumlah mahasiswa diploma di PTAIN hanya berjumlah 3.005 mahasiswa. Sedangkan jumlah mahasiswa S1 di PTAIN mencapai 268.452 mahasiswa. Jumlah mahasiswa S2 mencapai 11.125 mahasiswa, dan jumlah mahasiswa S3 5.267 mahasiswa.

Dari jumlah total mahasiswa PTAIN di Indonesia yang totalnya mencapai 287.849 mahasiswa, 93% diantaranya adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan S1 (268.452), 3,86% nya adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan S2, dan 1,83% adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan S3.

Tantangan Pendidikan Islam atas Komunitas ASEAN 2015

Pembangunan pendidikan Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal menyangkut kondisi sosial, budaya dan lingkungan, teknologi, politik, yang terjadi di tingkat regional kawasan dan global. Kondisi sosial budaya dan politik yang mempengaruhi pembangunan pendidikan Islam dalam kurun waktu lima tahun kedepan di tingkat regional kawasan antara lain adalah disepakatinya Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) yang akan dimulai tahun 2015 besok.

Komunitas ASEAN merupakan salah satu target yang dicanangkan terwujud pada tahun 2015 oleh ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara. Komunitas ASEAN ini memiliki semangat untuk “menyatukan” seluruh warga masyarakat Asia Tenggara dalam satu wadah komunitas besar, dimana interaksi antar masyarakat, perputaran barang dan jasa, tidak lagi terbatas oleh *state boundaries*.

Lingkungan strategis yang berubah di tingkat regional kawasan tersebut memiliki dampak dan tantangan tersendiri bagi pendidikan Islam di Indonesia. Proses integrasi ekonomi, politik dan sosial-budaya di kawasan akan berdampak besar pada aspek pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini dipertegas oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Prof. Dr. Nur Syam, M.Si, yang dalam suatu forum menyatakan bahwa masyarakat muslim Indonesia harus bisa mengambil nilai positif dari kesepakatan Komunitas ASEAN, karena kebijakan dan kesepakatan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung akan berdampak kepada dinamika pendidikan Islam di Indonesia khususnya, dan Asia Tenggara pada umumnya. Karena kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang penduduk muslimnya mencapai 41%. Pendidikan Islam, khususnya level Perguruan Tinggi harus mampu merespon dan menjawab berbagai tantangan yang muncul, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Di tingkat regional kawasan, banyak terdapat lembaga pendidikan Islam dan

perguruan tinggi Islam yang tersebar di Malaysia, Brunai Darussalam, Thailand Selatan dan Filipina Selatan. Yang kesemuanya itu, bisa menjadi partner dalam menjalin kerjasama, utamanya kerjasama dalam bidang pendidikan (Nur Syam, Sambutan Workshop Penyusunan Rencana Strategis di Hotel Malang).

Senada dengan hal diatas, menurut Anis Baswedan, dampak dari kesepakatan regional tentang Komunitas ASEAN sangat besar bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun penekanan dari Komunitas ASEAN adalah aspek ekonomi, namun aspek pendidikan mau tidak mau juga akan menyesuaikan (Anies Rasyid Baswedan, *wawancara*, 02 Desember 2013). Masih berkaitan dengan dampak kesepakatan Komunitas ASEAN, Gunaryo menambahkan bahwasannya tiap tahun jumlah santri asing yang masuk ke Indonesia untuk mendalami ilmu agama Islam semakin meningkat kuantitasnya. Meskipun tidak eksplisit dikatakan bahwa ini adalah eksese adanya kesepakatan Komunitas ASEAN tersebut, namun bisa ditegaskan bahwa keberadaan Komunitas ASEAN semakin membuka peluang bagi masyarakat di Asia Tenggara untuk belajar ilmu agama Islam di Indonesia, karena dengan adanya Komunitas ASEAN tersebut, pergerakan manusia semakin dipermudah dan sengaja untuk disatukan dalam satu komunitas besar (Ahmad Gunaryo, *wawancara*, 29 Oktober 2013).

Berikut ini adalah tantangan pendidikan Islam atas Komunitas ASEAN, yakni

Shifting Paradigm; Materialis-Sekuleris

Komunitas ASEAN yang penekanannya adalah aspek ekonomi dan keterbukaan pasar, semakin membuat kehidupan masyarakat Asia Tenggara menjadi semakin dekat dengan materi dan hal-hal kebendaan. Diakui atau tidak, bahwa proses integrasi ekonomi akan menimbulkan efek sampingan bagi masyarakat, terutama lahirnya kecenderungan masyarakat kepada hal-hal yang bersifat konsumtif, materialistic dan individualistik. Hal tersebut terjadi dikarenakan masing-masing

individu dituntut untuk memenuhi kebutuhan riil sesuai dengan tuntutan integrasi ekonomi di kawasan. Selanjutnya, efek sampingan yang dialami oleh masyarakat dalam proses integrasi ekonomi sebagai berikut.

Pertama, berkembangnya mass culture karena akulturasi budaya dan kemajuan ICT, sehingga kultur tidak lagi bersifat lokal, melainkan bersifat regional kawasan atau bahkan bersifat global. *Kedua*, integrasi ekonomi pada dasarnya dibangun atas proses yang rasional dan empirik. Ini berarti faham-faham keagamaan atau kepercayaan yang tidak dapat diterima akal dan rasio akan ditinggalkan. *Ketiga*, masyarakat “komunitas” juga akan ditandai oleh semakin meningkatnya sikap hidup materialistic. Setiap kemajuan harus dapat diukur dengan ukuran-ukuran materi, ekonomi dan kebendaan, baik pada tingkat individu, negara, maupun komunitas. Di sisi lain, eksistensi agama mengajarkan bahwa keberhasilan itu harus diukur dari dua aspek, yakni keberhasilan di bidang ekonomi dan materi, serta keberhasilan di bidang ibadah dan keimanan. *Keempat*, integrasi ekonomi, politik dan sosial-budaya akan ditandai dengan maraknya kegiatan dan pergerakan transnasional, baik barang, jasa dan manusia. Hal ini akan mengakibatkan konsekuensi tersendiri terhadap nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang telah lama berlaku di masyarakat.

Inilah yang dimaksud dengan *shifting paradigm*. Sedangkan aspek sekulerisme disini bukan berarti otomatis anti agama yang identik dengan anti “iman” dan anti “takwa”. Sebaliknya, sekulerisme disini tidak selalu anti “iman” dan tidak selalu anti “takwa”. Sekulerisme disini hanya menolak peran agama untuk mengatur kehidupan publik, termasuk aspek pendidikan. Maksudnya disini adalah, selama agama hanya dijadikan “pelengkap” atau tidak dijadikan asas dalam menata kehidupan publik seperti sebuah sistem pendidikan, maka sistem pendidikan itu tetap sistem pendidikan sekuler,

meskipun para individu pelaksana sistem pendidikan tersebut beriman dan bertakwa.

Senada dengan hal diatas, Bryan S. Turner dalam Ticoalu (1984) menyatakan bahwa pengawasan sekuler terhadap pendidikan agama bukan ditujukan untuk menghilangkan Islam, melainkan untuk menghilangkan hubungan agama dan pendidikan agama dari nilai-nilai lembaga pendidikan tradisional.

Karenanya, keberadaan Komunitas ASEAN akan berpeluang merubah atau bahkan menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal, karena proses integrasi regional di kawasan tersebut. Sehingga, dampak yang ditimbulkan dari Komunitas ASEAN tersebut adalah bergesernya paradigma kehidupan masyarakat menjadi sekuler-materialistik. Dari perkembangan ini, idealnya, posisi pendidikan Islam di Indonesia adalah tetap menjaga nilai-nilai keagamaan yang dipeganginya selama ini, namun tidak meninggalkan perkembangan sains dan teknologi yang berkembang dewasa ini. Pasalnya, banyak produk pendidikan umum, kejuruan, profesi dan pendidikan advokasi yang mereka memang ahli dan matang di bidangnya masing-masing, namun merasa kering dalam pembentukan karakter dan kepribadian muslimnya. Sehingga, tidak mengherankan bila banyak koruptor-koruptor kelas kakap yang justru berasal dari manusia yang terdidik secara baik di bidang akademiknya.

Senada dengan hal diatas, pendidikan Islam seharusnya tidak mendikotomikan antara hal-hal yang bersifat duniawi dan hal-hal yang bersifat ukhrawi, seperti pemisahan jasmani dan ruhani. Ini merupakan permasalahan fundamental pendidikan Islam yang muncul di Indonesia. Pendidikan Islam idealnya membicarakan dan mendialektikkan hal-hal yang sakral dan yang profan, antara dunia dan akhirat (Muhaimin dan Mujib, 1993: 83), sehingga pendidikan Islam pun harus merespon perubahan lingkungan strategis yang berkembang di tingkat regional kawasan, khususnya keberadaan Komunitas ASEAN 2015 mendatang.

Untuk lebih jelasnya strategi yang seharusnya dilakukan dan dikembangkan oleh lembaga pendidikan Islam dalam merespon keberadaan Komunitas ASEAN, akan dipaparkan pada sub bab berikutnya.

Towards a New Paradigm

Komunitas ASEAN sebagai dinamika yang berkembang di tingkat regional kawasan telah merombak semua sendi-sendi kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan juga paradigam baru dalam dunia pendidikan, tidak terkecuali pendidikan Islam. Senada dengan hal ini, Fasli Jalal menyatakan bahwa pengembangan pendidikan menjadi niscaya, karena peran pendidikan merupakan sentral kehidupan. Kehidupan sosial yang mengalami perubahan, pergeseran, sistem sosial, politik dan sistem ekonomi yang selalu dinamis harus diiringi dengan perubahan paradigma dalam bidang pendidikan (Jalal, 2001:6).

Secara filosofis, dari pendapat tersebut diatas, pendidikan harus dikembangkan berdasarkan tuntutan acuan perubahan tersebut dan berdasarkan karakteristik masyarakat yang dinamis. Sedangkan dalam menghadapi perubahan di tingkat regional kawasan, yakni keberadaan Komunitas ASEAN, pendidikan Islam harus mampu mengembangkan sikap inovatif yang berkualitas.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka pendidikan Islam harus banyak berbenah diri. Para kyai sebagai pimpinan lembaga pendidikan Islam harus selalu meningkatkan pengetahuan umumnya dengan cara formal akademik, misalnya dengan menempuh pendidikan di perguruan tinggi, karena Islam tidak mengenal lelah dalam *tholab al-'ilmi*. Seperti maqolah yang mengatakan “menuntut ilmu lah walau sampai ke negeri China”

Penekanan kepada kyai diatas sebenarnya bukan tanpa alasan. Pasalnya, kyai sebagai pimpinan pondok pesantren di Indonesia mayoritas belum pernah menempuh pendidikan tinggi. Sebanyak 25.312 kyai (atau sekitar 85%) dari 29.583

kyai pimpinan pondok pesantren di seluruh Indonesia belum pernah masuk perguruan tinggi. Hal ini sangat ironis, dan menurut hemat penulis, ini merupakan salah satu faktor penghambat pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Oleh karenanya, penekanan atas kyai ini menjadi penting, dengan harapan ketika pimpinan pondok pesantren sudah membuka diri untuk mempelajari ilmu-ilmu umum, seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, sains dan teknologi, maka secara tidak langsung ini akan menjadi *uswah al-hasanah* bagi para santrinya. Kalau ini yang terjadi, maka keberadaan Komunitas ASEAN pada 2015 mendatang akan memposisikan masyarakat muslim khususnya menjadi subjek, bukan menjadi objek.

Penutup

ASEAN Community 2015 sudah di depan mata. Tantangan yang muncul bagi dunia bidang pendidikan Islam di Indonesia adalah pergeseran 189aradigm (*shifting paradigm*). Dengan semakin terbukanya lalu lintas barang, jasa dan manusia di kawasan, maka masyarakat akan cenderung menjadi sekuler-materialistik. Disini arti penting pendidikan agama dan pendidikan karakter berperan. Sehingga diharapkan menjadi *balancing* dalam irama kehidupan yang semakin kering akan nilai-nilai tersebut.

Adapun strategi utama yang harus segera di implementasikan penyelenggara pendidikan Islam di Indonesia adalah; *pertama*, meningkatkan dan mengembangkan pembelajaran Bahasa Inggris pada peserta didik. *Kedua*, meningkatkan kerjasama pendidikan Islam di tingkat regional kawasan.

Daftar Rujukan

- Achsani, Noer Azam. *Integrasi Ekonomi ASEAN+3; Antara Peluang dan Ancaman*. The Brighten Institute. <http://brighten.or.id>
- Adler, Emmanuel & Michael Barnett. 1998. *Security Communities*. Cambridge: Cambridge University Press.
- al-Syaibany, Omar Mohammad. 1979. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Arifin, Syamsul dkk. 2007. *Integrasi Keuangan dan Moneter di Asia Timur; Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Arifin, Sjamsul. dkk. 2008. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Bogdan, Robert C. dan Kopp Sari Biklen. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. London: Allyn and Bacon
- Direktorat Kerjasama ASEAN. 1999. *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta; Ditjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI
- Farrel, Marry. "The Global Politics of Regionalism; An Introduction", dalam Marry Farrel dan Bjorn Hettne. 2005. *Global Politics of Regionalism*, London: Pluto Press
- Freire, Paulo. 2002. *Politik Pendidikan; Kebudayaan Kekuasaan dan Pembebasan*. Penerjemah Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hurrel, Andrew. 1995. *Regionalism in World Politics*. US: Oxford University Press
- Inayati, Ratna Shofi. 2000. *33 Tahun ASEAN, Keberhasilan dan Kegagalan di Dalam Menuju ASEAN Vision 2020; Tantangan dan Inisiatif*. Editor; Ganewati Wuryandari. Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI
- Jalal, Fasli. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita
- Luhulima, CPF. 2008. *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Jakarta: P2P LIPI
- Mansbaach, Richard W. dalam Nuraeni Suparman dkk. 2010. *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mariamba, Ahmad D. 1989. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif
- Masahiro, Kashima dan Benny The Cheng Guan, "New Regionalism in Comparison, The Emerging Regions of East Asia and The Middle East", <http://dspace.lib.kanazawau.ac.jp/dspace/bitstream/2297/4464/1/KJ00004371022.pdf>
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Mintzberg, Henry. 2007. "Cycles of Organizational Change", *Strategic Management Journal*, Vol.13 page 98-110.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penulisan Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Rosda Karya

- Nainggolan, Poltak Partogi. 2012. "Tantangan Menuju Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015)", *Analisis CSIS*, Vol.41, No.3
- Nassar, Jamal R. 2010. *Globalization & Terrorism: The Migration of Dreams and Nightmares*, 2nd Ed, Oxford: Rowman and Littlefield.
- Rangkuti, Freddy. 2009. *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta: Gramedia
- Rudy, T. May. 1997. *Studi Kawasan; Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia*. Bandung: Bina Budaya
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penulisan Kualitatif*. Bandung: Afabeta
- Soesastro, Hadi. 2005. *Accelerating ASEAN Economic Integration; Moving Beyond AFTA*, Jakarta: CSIS Economic Working Paper Series
- Wulan, Alexandra Retno & Bantarto Bandoro (ed). 2007. *ASEAN'S Quest for A Full-Fledged Community*. Jakarta: CSIS
- Zamrozi. 2000. *Paradigma Pendidikan di Masa Depan*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika

Dokumen

- ASEAN Declaration, Bangkok, 08 Agustus 1967
- ASEAN, *A Roadmap for An ASEAN Community; 2009-2015*, Jakarta; ASEAN Secretariat, 2009
- ASEAN Charter, Bab I, pasal 1
- ASEAN Charter, Bab I, pasal 5
- Blueprint ASCC secara lengkap bisa diakses melalui <http://www.aseansec.org/5187-19pdf>
- Pidato HR. Agung Laksono pada Sidang ASEAN Sosio Culture Community (ASCC) ke-9
- 12th ASEAN Summit, Januari 2007

Wawancara

- Wawancara dengan Staf Sekretariat ASEAN
- Wawancara dengan Anies Rasyid Baswedan, Rektor Universitas Paramadina Jakarta, tanggal 02 Desember 2013
- Wawancara dengan Prof. Dr. Nur Syam, M.Si, Dirjen Pendidikan Islam KEMENAG RI
- Wawancara dengan Prof. Dr. Ahmad Gunaryo, M.Soc, Sc (Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, KEMENAG RI) pada tanggal 29 Oktober 2013